

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender (GBV) merupakan salah satu permasalahan yang hampir terjadi di semua negara di dunia. Tingginya angka GBV di dunia ini menjadikannya sebagai salah satu agenda global yang harus ditangani secara bersama. Hal ini ditandai dengan adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang merupakan serangkaian tujuan yang di buat oleh PBB sebagai panduan bagi negara-negara di dunia untuk mengatasi permasalahan global. General Recommendation Nomor 35 CEDAW juga telah menjadi suatu norma hukum kebiasaan internasional. Adanya kesepakatan bersama antar negara-negara di dunia mengenai penghapusan GBV kemudian membuat penghapusan GBV menjadi salah satu norma internasional. Dalam mempromosikan norma tersebut terdapat aktor yang menjadi *norms entrepreneur* agar negara-negara di dunia mengadopsi seperangkat instrumen tersebut, di antaranya seperti UN Women, UNICEF dan UNFPA.

Di Afrika Selatan, GBV merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dengan perkiraan lebih dari separuh perempuan dan anak perempuan telah mengalami GBV seumur hidupnya. Salah satu faktor yang berpengaruh dari berkembangnya GBV di negara ini yaitu ketidaksetaraan gender dan patriarki yang berkembang di masyarakat. Pada budaya patriarki, laki-laki seringkali dianggap dan bertindak sebagai pihak yang berkuasa dibandingkan perempuan, sehingga dominasi fisik, emosional serta mental yang dilakukan terhadap perempuan dianggap sebagai hal yang lumrah. Tidak hanya itu, instrumen hukum serta badan

nasional yang telah dibuat oleh pemerintah juga terkesan menjadi salah satu pendorong tingginya angka GBV. Hal ini dikarenakan pemerintah cenderung tidak siap dalam menangani korban dan penyintas GBV. Instrumen hukum di Afrika Selatan juga hanya menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, namun tidak memiliki instrumen mengenai GBV, di mana GBV ini tidak hanya menyerang perempuan, tetapi juga anak-anak dan kaum LGBTQIA+. Tidak jarang bahwa aparat penegak hukum juga berpikiran patriarki dan menyalahkan setiap korban yang melapor bahwa mereka mengalami GBV.

Hal ini kemudian memperlihatkan betapa pentingnya lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan untuk dapat menghasilkan sebuah instrumen dan praktik baru. Proses lokalisasi ini dimulai dari adanya *international norms entrepreneur*, yaitu UN Women, UNICEF dan UNFPA yang telah menyebarkan norma-norma terkait untuk membantu negara-negara anggota menetapkan standar yang telah disepakati bersama guna mengakhiri GBV ini. Norma-norma yang disebarkan oleh *norms entrepreneur* tersebut merupakan norma-norma yang tercantum dalam General Recommendation CEDAW nomor 19 dan 35, Konferensi Beijing, Konvensi Dewan Eropa (Konvensi Istanbul), nilai-nilai yang terdapat pada SDGs, serta Deklarasi Khidmat tentang Kesetaraan Gender di Afrika. Sebagai *norms entrepreneur*, UN Women, UNICEF dan UNFPA telah melakukan serangkaian upaya seperti meningkatkan kesadaran melalui kampanye HeForShe, kampanye One Man Can, serta kampanye 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Hadirnya *international norms entrepreneur* ini di Afrika Selatan juga telah menjadi suatu langkah yang mendorong terjadinya lokalisasi norma di negara ini.

Tulisan ini telah memperlihatkan interaksi antaraktor dalam proses lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan, mulai dari pra-lokalisasi, inisiatif lokal, proses adaptasi, hingga tahap akhir yaitu amplifikasi dan universalisasi. Tahapan pertama yaitu pra-lokalisasi, di mana UN Women sebagai *norms entrepreneur* mulai mengadakan kampanye HeForShe dan Spotlight Initiative di Afrika Selatan. Kampanye UN Women tersebut membuat pemerintah Afrika Selatan mulai melihat *ending gender-based violence* sebagai salah satu norma yang mampu mengatasi tingginya kekerasan di negara ini. Hal ini terlihat dari pemerintah Afrika Selatan mulai mendukung tiga resolusi penting dari Sidang ke-35 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada tahun 2017. Pada tahapan ini UNFPA juga telah mulai untuk melaksanakan program memerangi GBV dengan mendekati para pemimpin adat atau *amakhosi* di daerah pedesaan. UNFPA bersama UNICEF juga telah berupaya menjalankan program “Safer South Africa for Women and Children” dalam mengatasi GBV. Program ini dilakukan untuk memperkuat pencegahan kekerasan di komunitas Afrika Selatan.

Tahapan yang kedua yaitu inisiatif lokal, di mana ini terlihat dari kelompok perempuan dan feminis di Afrika Selatan melakukan aksi protes berskala nasional pada 1 Agustus 2018 di bawah tagar #TotalShutdown. Aksi protes #TotalShutdown ini dipengaruhi oleh adanya gerakan #MeToo yang bertujuan untuk mengajak perempuan dan kaum LGBTQIA+ untuk mengambil sikap dalam memerangi GBV. Aksi inisiatif lokal lainnya dalam proses lokalisasi norma ini yaitu adanya kerja sama antara Sonke Gender Justice dan UN Women dalam proyek ‘Safe at Home, Safe in Relationship’.

Tahapan ketiga yaitu adaptasi norma, di mana aktor yang memiliki peran penting di sini yaitu aktor lokal. Aktor lokal yang telah memainkan peran penting pada tahapan ini yaitu Sonke Gender Justice, South African Youth Gender Action Plan dan Foundation for Human Rights. Ketiga aktor lokal ini telah melakukan berbagai program dan advokasi kepada pemerintah untuk mendorong dan menyegerakan pembuatan Rencana Strategis Nasional untuk memerangi GBV secara inklusif dan mengikutsertakan perempuan, anak-anak, serta kaum LGBTQIA+. Selain itu Sonke juga menyerukan Departemen Pembangunan Sosial untuk segera memberikan kontribusi finansial terkait Thutuzela Care Centre sebagai tempat perawatan bagi korban GBV. Selain mengadvokasi pemerintah, Sonke juga turun langsung dalam menyesuaikan norma tersebut dengan mengadakan program One Man Can. Program OMC ini akan selaras dengan norma lokal mengenai intervensi pencegahan GBV yang berfokus pada maskulinitas.

Tahap keempat yaitu amplifikasi dan universalisasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya NSP-GBVF atau Rencana Strategis Nasional mengenai GBV, GBVF Response Fund, serta RUU tentang Dewan Nasional GBVF atau NCGBVF oleh pemerintah Afrika Selatan. Ketiga instrumen baru yang dikeluarkan ini menjadi titik akhir dari proses lokalisasi norma di Afrika Selatan. Instrumen yang dikeluarkan ini juga sekaligus menjadi penanda keberhasilan yang dicapai oleh aktor-aktor terkait dalam lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan. Hal ini dikarenakan capaian keberhasilan lokalisasi suatu norma dilihat dari adanya instrumen atau kebijakan baru yang dikembangkan yang kemudian diharapkan akan dapat menangani serta mengurangi kasus GBV di Afrika Selatan.

5.2 Saran

Penelitian ini berfokus pada interaksi antaraktor dalam proses lokalisasi norma yang telah dilakukan di Afrika Selatan seperti UN Women, UNICEF, UNFPA, pemerintah Afrika Selatan, serta organisasi masyarakat yaitu Sonke Gender Justice, South African Youth Gender Action Plan dan Foundation for Human Rights. Proses lokalisasi ini telah melahirkan beberapa instrumen baru yang menjadi awal dari berkembangnya norma tersebut di Afrika Selatan. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat bagaimana tantangan dari lokalisasi serta bagaimana implementasi dari norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan. Dengan demikian, penulis berharap bahwa penelitian selanjutnya dapat melengkapi rumpangnya penelitian ini.

